

## **DESAIN DESA DEMOKRASI PARTIPATIF SEBAGAI STRATEGI BANWASLU MENCEGAH POLITIK UANG**

### ***PARTICIPATIVE DEMOCRATIC VILLAGE DESIGN AS BANWASLU STRATEGY ON MONEY POLITICS PREVENTIVE***

**Mismaruddin<sup>1</sup>, Zainuddin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Cot Kala, Kota Langsa, Aceh, Indonesia.

E-mail: mismaruddinsofyah@gmail.com/ mismaruddinsofyah@gmail.com

Diterima: 4/12/2025; Revisi: 7/12/2025; Disetujui: 16/12/2025

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu 2024 di Desa Buket Meutuah, kota Langsa, Aceh. Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka dan interview kasus menggunakan konsep interdisiplin socio legal. Sampel yang digunakan berasal dari bawaslu sebagai tokoh kunci, kepala desa, tokoh masyarakat. Desa yang dituju adalah desa model anti politik uang di kota langsa, Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terpilihnya Desa Buket Meutuah sebagai desa Demokrasi partisipatif disebabkan oleh aspek jumlah pemilih, faktor multikultural, kondisi intensitas konflik, indeks ekonomi dan aspek gender.

Kata Kunci: Desa, demokrasif partisipatif, politik uang

#### **ABSTRACT**

*This study aims to see the relationship between money politics ahead of holding the 2024 elections in Buket Meutuah Village, Langsa City, Aceh. Data collection techniques with library research and case interviews use the socio-legal interdisciplinary concept. The samples used came from banwaslu as key figures, village heads, and community leaders. The target village is an anti-money politics model village in Langsa City, Aceh. The results showed that the election of Buket Meutuah Village as a participatory democracy village was caused by aspects of the number of voters, multicultural factors, conditions of conflict intensity, economic index and gender aspects.*

*Keywords:* *village, Participative democratic, money politics.*

#### **PENDAHULUAN**

Badan pengawas pemilu (banwaslu) menetapkan Desa Buket meutuah sebagai Desa Demokrasi partisipatif pemilu 2024. Desa Buket meutuah dijadikan sebagai role model untuk meningkatkan partisipatif masyarakat. Lahirnya demokrasi dimulai dari *grassroot* demokrasi.

*Grassroot demokrasi yang kuat dimulai dari masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.*

*Pelanggaran dalam sistem demokrasi menuntut badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk berkolaborasi dalam peningkatan partisipatif sebagai bentuk kolaboratif (Collaborative governance). Kolaboratif yang*

dimaksud adalah bentuk Kerjasama antara public dengan individu, masyarakat, maupun Lembaga organisasi. Pengawasan partisipatif tertuang dalam peraturan UU/7/2017 tentang pemilu. Pasal 448 ayat (3) menyatakan: bahwa bentuk partisipatif masyarakat diantaranya meningkatkan partisipatif politik dan mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi kondisi pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Salahsatunya pembentukan desa demokrasi partisipatif politik, terutama politik uang. Modus yang biasa ditemukan adalah dengan istilah serangan fajar, sarapan pagi (dhuha) dan penjemputan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Fitriyah, 2015).

Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pemilu dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik uang.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka dan interview kasus menggunakan konsep interdisiplin socio legal. Sampel yang digunakan berasal dari banwaslu sebagai tokoh kunci, kepala desa, tokoh masyarakat. Desa yang dituju adalah desa model anti politik uang di kota langsa, Aceh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Buket Meutuah, kota langsa dengan luas 120 dengan jumlah penduduk 1059 orang terdiri dari 539 laki-laki dan 520 perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan desa Buket Meutuah, kota langsa terpilih sebagai desa demokrasi partisipatif.

### 1). Jumlah Pemilih

Jumlah penduduk Buket meutuahrelatif lebih sedikit, hal ini memungkinkan Tindakan money politic dapat dihindari dengan porporasi masyarakat yang lebih kecil.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

### 2). Faktor multikultur

Desa Buket meutuah terdiri dari masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Multikultur menunjukkan kondisi yang berbeda-beda tetapi bisa hidup berdampingan dan saling menguntungkan satu sama lain. Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku, keragamanya terlihat dari banyaknya pulau, ras, warna kulit, budaya, etnis, agama, dan bahasa yang bersatu di bawah kekuasaan negara. berbicara tentang aspek keanekaragaman itu ditanggapi dan disikapi secara normatif Secara teoritis multicultural suatu kondisi wilayah tertentu mengandung nilai-nilai yang jika diterapkan dikebijakan politik masyarakatnya atau secara kultural dilaksanakan oleh segenap warga ditataran akar rumput akan cukup efektif untuk mewujudkan tatanan sosial yang mapan dan mampu meminimalisir hadirnya konflik

### 3). Kondisi Intensitas Konflik

Dengan beragamnya kultur yang ada di Buket Meutuah maka potensi konflik juga menjadi rendah. Budaya yang berbeda menjadikan masyarakat suatu desa akan menjadi saling bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun desa tempat tinggalnya (Nindito, 2013).

Partisipasi masyarakat dengan kultur yang berbeda dapat berproses dalam mengidentifikasi masalah dan masyarakat seperti dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan dalam menangani suatu permasalah

termasuk didalamnya money politik (Isbandi, 2007).

#### 4). Indeks ekonomi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat desa dan kepala desa, desa Buket Meutuah memiliki produk unggulan Desa sehingga memiliki kemandirian secara ekonomi, diantaranya produk kerajinan tangan, pupuk cair dengan pasar mencakup Kota Langsa dan luar kota Langsa, teknologi tepat guna berupa kawat harmonika.

Kemandirian ekonomi masyarakat ditandai dengan kemampuan dalam berpikir, memutuskan serta melakukan sesuatu dalam pemecahan masalah dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki termasuk dalam mengidentifikasi masalah-masalah politik (Supriana, 2011).

Partisipasi perempuan sebanyak 49,10 %. Kiprah perempuan di dalam masyarakat seyogyanya di atas 30%. Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar (Vitalaya, 2010).

Tingginya kiprah perempuan di Desa Buket Meutuah terlihat dengan partisipasi mereka di dalam aspek kegiatan Kesehatan berupa posyandu maupun paud. Keterlibatan perempuan yang tinggi di dalam kegiatan masyarakat juga memudahkan transfer pengetahuan politik pada masyarakat.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan terkait penetapan Desa Buket Meutuah, Kota Langsa Sebagai Desa Demokrasi Partisipatif Oleh Bawaslu ada 5 aspek yang terkait di dalamnya, yaitu aspek jumlah pemilih, faktor multikultur, kondisi intensitas konflik, indeks ekonomi dan aspek gender.

#### 5). Aspek Gender

Tingkat partisipasi perempuan hampir menyamai laki-laki di Desa Buket Meutuah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Supriana, 2011, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Reneka Cipta.

Parekh, B, 2008. Rethinking Multiculturalism, keberagaman Budaya dan Teori Praktik. Impuls.

Nindito, S, 2013, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial”, Jurnal Ilmu Komunikasi (2): 54.

Isbandi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press.

Vitalaya, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press.

Fitriyah, 2015, “cara kerja politik uang”, Politika: Jurnal Ilmu Politik, 6(2).